

**STUDI PENCATATAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA
LSM SYEKH YUSUF SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA
SULAWESI SELATAN**

Hamzah Limpo
*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIE – Indonesia) Makassar*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia tuntutan publik pengelolaan akuntansi dan keuangan negara secara profesional mulai direspon pemerintah melalui reformasi keuangan negara dengan berbagai peraturan perundangan seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, terakhir PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini memberi secercah harapan akan terlaksananya pengelolaan praktik akuntansi dan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel. Harapan ini harus selalu diverifikasi melalui penelitian kebijaksanaan dan dikembangkan melalui penelitian murni

Permasalahan adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat bahwa yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi, dan demokrasi. Dengan kata lain, memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan segala bidang dan sektor kehidupan (*Uphoff, 1995 : 20*). Rakyat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin di kota dan di desa, kelompok masyarakat dalam kondisi yang marginal, dan dalam posisi lemah, serta pinggiran. Prinsip dari berbagai program tersebut adalah pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sehingga program ini bersifat mendidik masyarakat sasaran agar mampu mengatasi permasalahan dengan menggunakan potensi sendiri. Program ini bersifat berkelanjutan dengan menumbuhkan perilaku kolektif ditingkat mikro yang mencerminkan nilai rukun, peduli, mandiri dan sejahtera.

Pembahasan tentang upaya pemberdayaan rakyat memang tidak dapat terlepas dari keberadaan dan peranan organisasi Non-pemerintah (Omop) atau NGOs (*Non-Governmental Organization*) yang tersebar baik dilingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam tulisan ini akan digunakan batasan Ngos dalam arti sempit yang meliputi Organisasi Nirlaba (ONL) atau *Non-Profit Organization* (NPO). Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) atau *Grassroots Support Organization* (GRSO). Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Grassroots Organization* (GRO), yang kegiatannya berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan dan perubahan sosial, serta pemberdayaan rakyat (Prinjono, 1995 : 590, 1992 : 444, 1991 : 131-132). Isitilah NGO dan LSM seringkali tumpang tindih. LSM adalah NGO, tetapi NGO belum tentu merupakan LSM. NGOs sebagai organisasi atau kelompok sangat heterogen atau beraneka ragam, tetapi pada dasarnya mereka ingin memperjuangkan tujuannya hingga mencapai kenyataan, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Garilao (1997, 115-116) berpendapat adalah NGOs menciptakan suatu individu jasa baru, yaitu industri pengembangan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah bahwa :

Bagaimana bentuk laporan keuangan LSM Syekh Yusuf yang ada di Kabupaten Gowa sebagai pertanggungjawaban terhadap pemberi dana.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan LSM Syekh Yusuf selaku penerima dana pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan gambaran kontribusi LSM Syekh Yusuf dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pembangunan di Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam menetapkan kebijakan strategi pembinaan dan koordinasi pada LSM, dalam penyusunan laporan keuangan LSM.
2. Sebagai bahan informasi bagi aktivis akademisi dalam memperluas perspektif pengembangan akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi keuangan non profit.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkompeten dan berminat dalam pengembangan wawasan, pengetahuan khususnya mengenai LSM, sehingga dapat diperoleh bentuk pencatatan akuntansi yang baku dalam penyusunan laporan keuangan LSM yang dapat diterima secara umum.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti berikutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Praktik akuntansi dalam suatu negara harus selalu berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan dunia bisnis. Lebih dari itu, praktik akuntansi juga harus dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Untuk itu, belajar praktik dan teknik akuntansi saja tidak cukup karena praktik yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sehat. Teori akuntansi membahas berbagai masalah konseptual dan ideal yang ada di balik praktik akuntansi. Teori akuntansi mempunyai peran penting dalam pengembangan akuntansi yang sehat.

Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada kesepakatan tentang pengertian akuntansi sebagai suatu disiplin pengetahuan. Akuntansi dapat dipandang sebagai sains dan sebagai teknologi. Bila akuntansi dipandang sebagai sains, akuntansi akan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau validitas penjelasan tentang suatu fenomena akuntansi dengan menerapkan metode ilmiah. Teori akuntansi berkepentingan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan umum (yang bermula dari hipotesis) sebagai penjelasan praktik akuntansi. Bidang kajian menjadi yang menjadi pusat perhatian adalah masalah

fakta sehingga teori akuntansi harus bebas dari pertimbangan nilai. Teori akuntansi semacam ini disebut dengan teori akuntansi positif. Teori positif akuntansi menjelaskan fenomena akuntansi seperti ada adanya atas dasar pengamatan empiris.

Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, akuntansi merupakan teknologi perangkat lunak yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu pengetahuan tentang perekayasaan informasi untuk pengendalian keuangan negara. Hasil akhir akuntansi adalah prinsip. Metode atau teknik yang bermanfaat untuk mencapai tujuan akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Adanya tujuan sosial yang harus dicapai oleh akuntansi menjadi teori akuntansi banyak membahas pertimbangan nilai (*value judgment*). Ini merupakan teori akuntansi normative yang menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan perlakuan (standar) akuntansi karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai.

Makna sektor publik digunakan sebagai pasangan sektor swasta (*private sector*). Badan, organisasi, atau entitas yang berkaitan dengan sektor publik kemudian disebut sebagai badan publik (*public bodies*) sebagai pasangan dari organisasi bisnis.

Rosjidi (2001) menggunakan makna sektor publik untuk menunjuk karakteristik organisasi sehingga akuntansi sektor publik dipandang sebagai perluasan dan pengembangan akuntansi pemerintah (sebagai organisasi atau entitas). Walaupun demikian, organisasi yang dicakupi akhirnya semua berkaitan dengan pemerintah. Bastian (2001) memaknai secara implicit sektor publik sebagai sektor perekonomian yang ditangani oleh pemerintah dan mendefenisikan akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat (*public money*) yang dikelola melalui badan pemerintah dan non pemerintah (misalnya LSM dan Yayasan).

Istilah sektor publik banyak dikenal di Inggris dan negara-negara Eropa kontinental daripada Amerika. *The Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA), misalnya mempunyai komite yang disebut *Public Sector Accounting and Auditing Committee*. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mempunyai kompartemen akuntansi sektor publik. Memang ada dua kata dalam istilah

fakta sehingga teori akuntansi harus bebas dari pertimbangan nilai. Teori akuntansi semacam ini disebut dengan teori akuntansi positif. Teori positif akuntansi menjelaskan fenomena akuntansi seperti ada adanya atas dasar pengamatan empiris.

Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, akuntansi merupakan teknologi perangkat lunak yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu pengetahuan tentang perekayasaan informasi untuk pengendalian keuangan negara. Hasil akhir akuntansi adalah prinsip. Metode atau teknik yang bermanfaat untuk mencapai tujuan akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Adanya tujuan sosial yang harus dicapai oleh akuntansi menjadi teori akuntansi banyak membahas pertimbangan nilai (*value judgment*). Ini merupakan teori akuntansi normative yang menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan perlakuan (standar) akuntansi karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai.

Makna sektor publik digunakan sebagai pasangan sektor swasta (*private sector*). Badan, organisasi, atau entitas yang berkaitan dengan sektor publik kemudian disebut sebagai badan publik (*public bodies*) sebagai pasangan dari organisasi bisnis.

Rosjidi (2001) menggunakan makna sektor publik untuk menunjuk karakteristik organisasi sehingga akuntansi sektor publik dipandang sebagai perluasan dan pengembangan akuntansi pemerintah (sebagai organisasi atau entitas). Walaupun demikian, organisasi yang dicakupi akhirnya semua berkaitan dengan pemerintah. Bastian (2001) memaknai secara implicit sektor publik sebagai sektor perekonomian yang ditangani oleh pemerintah dan mendefenisikan akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat (*public money*) yang dikelola melalui badan pemerintah dan non pemerintah (misalnya LSM dan Yayasan).

Istilah sektor publik banyak dikenal di Inggris dan negara-negara Eropa kontinental daripada Amerika. *The Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA), misalnya mempunyai komite yang disebut *Public Sector Accounting and Auditing Committee*. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mempunyai kompartemen akuntansi sektor publik. Memang ada dua kata dalam istilah

tersebut yaitu sektor dan publik. Sektor dalam makro ekonomika lebih mengacu pada kegiatan penyediaan barang dan jasa melalui berbagai kegiatan yang dikategorikan menjadi berbagai sektor daripada mengacu pada jenis organisasi. Jadi sektor tidak mengacu pada organisasi penyediaan barang dan jasa. Publik sendiri mempunyai banyak makna yaitu pemerintah negeri, independen, terbuka untuk umum dan masyarakat umum. Jadi, istilah sektor publik memang agak problematik.

2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Menurut Hadad (1983 : 8) LSM merupakan kelompok primer, yaitu mereka yang bekerjasama karena mempunyai kesamaan aspirasi dan kegiatan bersama, di mana hubungan diantaranya akrab dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat lapisan bawah. Untuk mencapai tujuan bersama, mereka bekerja berdasarkan prinsip saling membantu berdasarkan kepentingan bersama yang biasanya adalah mengatasi persoalan kebutuhan dasar. Kelompok ini dikenal dengan nama *Self-help Groups*. Ciri-ciri kelompok ini adalah kecil, belum terorganisir secara baik, informal, miskin, dan berada di pedesaan atau perkampungan. Pada umumnya LSM dibantu oleh tenaga sukarela dan fokus kegiatan pada proyek-proyek. Perbedaan antara LSM dan pemerintah adalah bahwa hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tak dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah dikerjakan oleh LSM sebagai panggilan masalah kebutuhan (*necessity*) atau kemanusiaan karena berasal, berakar, dan tumbuh dari dan oleh masyarakat. Banyak studi kasus menunjukkan LSM lebih efektif daripada birokrasi pemerintah, terutama dalam keadaan yang membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat (Lenkowsky, 1996 : 87)

Sedangkan, LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) merupakan kelompok sekunder, yaitu organisasi yang bergerak pada tingkat di antara kelompok primer (*grassroots*) dan badan-badan pemerintah. Para pendirinya biasanya adalah orang-orang terdidik yang memiliki tujuan kemanusiaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang memerlukan pertolongan atau mereka yang miskin. Organisasi ini biasanya terlibat dalam kegiatan pembangunan yang seringkali belum dilakukan pemerintah atau pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukannya. Kelompok ini biasanya

terorganisir secara baik dan bersifat lebih formal daripada kelompok primer (Siregar, 1988 : 29). LPSM seringkali terdiri dari tenaga profesional dan bekerjasama dengan LSM di lapangan. Peran LPSM dalam mendukung kegiatan LSM adalah dengan jalan : (1) mengidentifikasi kebutuhan lokal/ setempat dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut; (2) merumuskan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran; (3) menyiapkan dana dan kondisi; serta (4) menobilisir sumber daya setempat atau dari luar untuk kegiatan pembangunan setempat atau di pedesaan. Selain itu, juga melaksanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan penting lainnya (Sumodiningrat, 1995).

Dalam pada Itun Soeljipto Wirosarjono (dalam Peter Haqul, 1989 : 139) mengemukakan bahwa :

"Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi masyarakat berkait atas motivasi dan swadaya yang berkait dari kesadaran solidaritas sosial. Kebutuhan LSM ini belakangan berkembang demikian rupa sehingga memiliki konotasi khas yang salah satu bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat"

Atas dasar motivasi tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan fungsinya menurut Ismid Hadad (dalam Abdul Rasak, dkk, 1991 : 7) antara lain :

1. Fungsi yang bersifat komplementer dalam Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berfungsi melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat dalam bidang atau sektor daerah yang karena satu dan lainnya belum digarap pemerintah.
2. Fungsi subsider atau sebagai peranan tambahan dalam arti atau menjadi pelaksana dalam program-program pembangunan pemerintah dan diwujudkan kepada kelompok-kelompok sasaran yang telah menjalin hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Fungsi penghubung atau perantara dari pemerintah ke masyarakat lapisan bawah atau sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah.

Fungsi-fungsi tersebut jika diimplementasikan dari kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat, maka tergambar dengan jelas bahwa wujud peran Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara konstruktif dapat diupayakan sesuai dengan proporsinya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Daerah Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Gowa, sebagai responden LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LSM Syekh Yusuf.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Kuantitatif, data berupa angka tentang model pelaporan keuangan.

3.2.2. Data Kualitatif, data dalam bentuk jenis kegiatan program yang telah dilaksanakan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Menyusun daftar pertanyaan.

3.3.2. Wawancara kepada LSM dan pejabat instansi / dinas yang terkait.

3.3.3. Masyarakat umum tentang keberadaan LSM.

3.4. Metode Analisa Data

Dari data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Singkat LSM Syekh Yusuf

Nama Syekh Yusuf diambil dari nama seorang pahlawan Nasional yang sekaligus penyiar Islam dan seorang shufi ulama besar yang telah membuat jaringan ulama Nusantara sampai ke Afrika Selatan.

LSM ini didirikan pada tahun 1998 dengan Akte Notaris No. 90 tanggal 26 Oktober 1998, Notaris Ny. Ery Haryanti, SH, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.815.704-801. Dengan keterangan terdaftar izin operasi :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Cq. Direktur Jenderal Sospol Sulsel No. 220/163-1, tanggal 17 Januari 2001.
- b. Kanwil Departemen Sosial Tk. I Sulsel No. 204/BOBS/4 SIOP/SS/1999, tanggal 22 Januari 1999.
- c. Pemerintah Kabupaten Gowa Cq. Kantor Sosial Politik No. 220/36/III/2001, tanggal 14 Maret 2001

- d. Pemerintah Kabupaten Gowa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/272/SITU/III/2000, tanggal 23 Maret 2000.
- e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa No. 061/20-22/I/1999, tanggal 28 Januari 1999.

LSM / Yayasan Syekh Yusuf sebagai lembaga sosial berpihak kepada rakyat sesuai dengan perjuangan Syekh Yusuf melawan Belanda dan mempertahankan hak asasi manusia, beliau menuntut ilmu agama berkeliling dunia tanpa bea siswa sampai ia mencapai gelar tertinggi "Tajjul Khalawyah" pemegang mahkota tarekat Khalwatiah. Olehnya itu Visi dan Misi LSM Syekh Yusuf dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Visi : Mewujudkan terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik melalui program bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan sehingga manusia dapat memahami dan menghayati apa arti hidup dalam menemukan dirinya selaku hamba Allah.
- Misi :
 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyuluhan yang berhubungan dengan dunia usaha.
 2. Mitra pengawasan lingkungan hidup pemukiman / perumahan kumuh desa nelayan dan penyediaan air bersih.
 3. Konsultan manajemen dan pendampingan masyarakat guna menjembatani UKM dengan lembaga keuangan.
 4. Memberi perlindungan / peduli anak yatim dan fakir miskin (non panti) serta penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba.
 5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta nasional dan swasta asing untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk merealisasikan Visi dan Misi tersebut di atas, maka jenis program yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

A. Bina Usaha

1. Membimbing pengrajin dengan menggunakan peralatan tradisional untuk berproduksi.
2. Mengerjakan pembukuan yang layak untuk usaha kecil dan menengah.
3. Memberikan bantuan modal kerja spontanitas melalui dana bantuan perusahaan negara (Pertamina dan Semen Tonasa)

B. Pendampingan Masyarakat / Bina Lingkungan

1. Supervisi Monitoring dan Evaluasi pembangunan perbaikan kawasan kumuh dan desa nelayan di Makassar Kelurahan Pannampu, Kelurahan Rappokalling, Kelurahan Bulowa Kecamatan Tallo kerjasama dengan Dinas Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan.
2. Community Base Development (CBD-KIP) Tribina Program IBRD Loan di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
3. Penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) di Desa Garing, Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Desa Julu Pa'mai Kecamatan Pallangga dan Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Pendampingan pada proyek Revegetasi Tanah DAS Waduk Bili-Bili Kabupaten Gowa kerjasama dengan Dinas Kehutanan Pertanian.
5. Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Optimalisasi Informasi Promosi Budaya-Pariwisata Kabupaten Gowa.
6. Proyek Sanitasi Pengadaan Jamban Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa di Desa Malakaji.
7. Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Dampak Bencana Alam.

C. Bidang Pemerintahan

1. Anggota Tim Tehnis Pengalihan Assets Ex. Pabrik Kertas Gowa.
2. Sekretaris Dewan Pertimbangan Zakat Tk. II Gowa.
3. Komisi Penyuluhan Kehutanan – Pertanian Kabupaten Gowa.
4. Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba / NAPSA Kabupaten Gowa.
5. Tim Ases Kemiskinan Partisipatif Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Gowa.

D. Bidang Pelatihan

1. Manajemen Koperasi bagi Koptan di Kelurahan Limbung Kabupaten Gowa.
2. Penguatan Pemasaran Industri Kecil se Kabupaten Gowa Swadaya LSM.
3. Organisasi dan Manajemen KUB (Kelompok Usaha Bersama) di Kabupaten Takalar.



4. Manajemen Keuangan dan Pemasaran bagi Pengrajin Emas dan Perak Kabupaten Gowa.
5. Kemasan minuman markisa di Kelurahan Malino Kabupaten Gowa.

4.2. Kontribusi LSM Syekh Yusuf Dalam Pembangunan

LSM Syekh Yusuf sebagai lembaga sosial yang dibentuk dengan kegiatan operasionalnya atau usaha-usaha yang dilaksanakannya adalah : Manajemen Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam atau Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman Kumuh, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, Pelatihan dan Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat serta menjalin kerjasama kemitraan pemerintah dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan juga menjalin kerjasama dengan Bank Dunia dalam program *Community Base Development Approach* (CBD). Maka untuk mengetahui jenis kegiatan dan pendanaan atau jumlah anggaran yang telah direalisasikannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 menggambarkan dana-dana tersebut telah dianggarkan dan digunakan sesuai peruntukannya, sasaran yang ingin dicapai pada setiap program yang diberikan atau diperoleh baik dari pemerintah maupun dari pihak penyandang dana lainnya seperti Bank Dunia melalui Bappenas Pusat Jakarta.

Dari jumlah anggaran yang diperoleh LSM Syekh Yusuf, maka anggaran yang paling besar jumlahnya adalah KUT sebesar Rp. 868.633.000,- diantaranya Rp. 352.000.000,- dalam bentuk pupuk selebihnya uang tunai dan kesemuanya diberikan kepada kelompok tani sebagai pengusul KUT sedangkan anggaran yang paling kecil jumlahnya adalah anggaran pendampingan perbaikan lingkungan hidup sebesar Rp. 75.000.000,- di terima bersih oleh pengurus dan tidak perlu dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan cukup memberikan laporan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para kontraktor, bila tidak ditandatangani oleh LSM maka kontraktor tersebut tidak dapat dibayar oleh Dinas Prasarana Wilayah, yang perlu dilihat atau diketahui sampai sejauh mana volume pekerjaan yang telah diselesaikan juga berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam proyek tersebut baik sebagai tenaga kerja maupun jumlah material, misalnya semen, pasir, batu bata dan paving blok yang dijual oleh pedagang yang ada di lokasi proyek.

4.3. Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan

LSM sebagai lembaga sosial tidak mempunyai laporan keuangan sebagaimana yang dikenal pada perusahaan-perusahaan yaitu dalam bentuk Neraca, Laporan Rugi-Laba, posisi Modal dan Laba yang ditahan sehingga dalam pembebanan pajak LSM selalu nihil. LSM hanya membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pemberi dana yang bentuknya sesuai keinginan pemberi dana yang telah ditentukan bentuk dan susunannya.

Sedangkan dana pendampingan tidak memerlukan laporan pertanggungjawaban sebagaimana layaknya.

Untuk kepentingan ini akan diuraikan bentuk dan susunan laporan pertanggungjawaban LSM Syekh Yusuf pada pemberi dana sebagai berikut :

1. Community Base Development (CBD) Program

Pada program CBD LSM bertugas :

- 1) Membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), BKM ini yang membuat laporan posisi keuangan Bappeda Tk. I Sul-Sel.
- 2) Mengadakan pelatihan koperasi, kerajinan tangan.
- 3) Menyediakan tenaga Fasilitator Kelurahan (FASHEL).

Adapun bentuk dan susunan laporan keuangannya dapat dilihat pada Tabel 2 Laporan Keuangan BKM Pallantikang, Tabel 3 Nota Posisi Keuangan, Tabel 4 Buku Kas Harian. Adapun ketiga tabel tersebut dapat dilihat halaman berikut.

Tabel 3
Nota posisi keuangan

Bulan : APRIL 2001

Tanggal	Uraian	Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo	-	-	277.898,-
2	Terima tambahan dana	15.069.400,-	-	-
3	Telah digunakan	-	-	-
4	Saldo sampai dengan saat ini	-	-	15.069.400,-
	Jumlah	15.069.400,-		15.347.298,-

Tanggal, 28 April 2001

Mengetahui :

Dibuat oleh,
Bendahara BKM

H. Ince Husain Dg. Rani
Ketua BKM

Syamsuddin Nawawi, SE
Faskel

H. Mallawangan Tawang
Bendahara

Tabel 4
Buku kas harian

Bulan : APRIL 2001

Tanggal	No.Bukti	Uraian	Pemasukan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	-	Terima Tambahan Dana	15.069.400,-	-	15.069.400,-
		Jumlah	15.069.400,-	-	15.069.400,-

Tanggal, 28 April 2001

Mengetahui :

Dibuat oleh,
Bendahara BKM

H. Ince Husain Dg. Rani
Ketua BKM

Syamsuddin Nawawi, SE
Faskel

H. Mallawangan Tawang
Bendahara

2. Program Kredit Usaha Tani (KUT)

KUT merupakan kredit lunak yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi RI dimana peruntukannya untuk para petani yang pada akhirnya merupakan masalah nasional sebab penyalurannya dari LSM ke kelompok

tani dari kelompok tani ke petani terdapat penyimpangan sehingga tidak kurang pengurus LSM di Indonesia harus berhadapan dengan hukum dan bahkan ada yang dipenjara 3 sampai 5 tahun, namun masih ada juga LSM yang jujur dalam menyalurkan kredit sesuai dengan visi dan misi didirikannya LSM tersebut.

Setiap LSM atau Yayasan yang ingin menyalurkan KUT, maka harus mendapat rekomendasi dari BKSLP5K (Badan Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi) di Jakarta. Sebagai persyaratan teknis untuk memperoleh rekomendasi BKSLP5K, maka harus dilampirkan :

- a. Akte Notaris / Akte Pendirian
- b. Susunan Pengurus Aktif
- c. Anggaran Rumah Tangga
- d. Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Sospol Tk. I
- e. Biodata Ketua dan Sekretaris
- f. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Setelah LSM memperoleh rekomendasi dari BKSLP5K, maka LSM harus mendata petani melalui kelompok tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kemudian menyusul RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kredit) setelah selesai RDKK diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM untuk memperoleh pengantar pencairan dana di Bank yang telah ditunjuk dalam hal ini Bank BRI, Bank Bukopin dan BNI serta Bank Danamon.

Uang KUT tersebut diterima langsung oleh Pengurus LSM kemudian disalurkan ke Ketua Kelompok Tani dari Kelompok Tani ke petani yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut dapat dilihat Rekapitulasi RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kredit) yang telah dikeluarkan oleh LSM Syekh Yusuf Kabupaten Gowa guna pemberdayaan petani, khususnya peningkatan produksi. Sedangkan pada Tabel 6 adalah Daftar Penerimaan Kredit KUT Kelompok Tani Battu Rikatte Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu. Selanjutnya pada Tabel 7 adalah Daftar Perkembangan Penyaluran KUT Musim Tanam 2000 yaitu pada

Kelompok Tani Batu Rikatte dan Kelompok Tani Watu-Watu Desa Julu
 Pa'mai Kabupaten Gowa.

Tabel 6
LSM "SYEKH YUSUF" Sulawesi Selatan
Daftar Penerimaan Kredit Usaha Tani (KUT)

Tahun Penyediaan (TP): 2000
 Kelompok Tani : Batu Rikatte I
 Desa : Paccinongang
 Kecamatan : Somba Opu

No.	Nama Petani	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Tanggal Penerimaan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
1.	AGUS DG. GASSING	1.538.250	14-1-2000	
2.	DG. MASSE	1.435.700	14-1-2000	
3.	DG. KULLE	1.640.800	14-1-2000	
4.	DG. MONE	820.400	14-1-2000	
5.	DG. TULA	1.125.050	14-1-2000	
6.	DG. RUMPA	820.400	14-1-2000	
7.	DG. NOJENG	1.640.800	14-1-2000	
8.	DG. MANYE	7.17.850	14-1-2000	
9.	DG. LAWANG	1.025.500	14-1-2000	
10.	DG. BETA	615.300	14-1-2000	
11.	DG. NAMBUNG	1.128.050	14-1-2000	
12.				
13.				
14.				
15.				
	JUMLAH			

Tanggal, 14 Januari 2000
 Pengurus Kelompok Tani,

(AGUS DG. NGAWING)

3. Program Lainnya

Untuk program pendampingan perbaikan lingkungan dan program pendampingan pemasangan pipa / bak penampungan air bersih tidak perlu dibuatkan laporan keuangan sebab merupakan pemberian pemerintah kepada LSM pendamping.

Respon pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan LSM dalam memberikan tanggapan baik tanggapan yang positif maupun dengan

pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada budaya dapat dikategorikan sedang sebab terkadang pemerintah memusuhi LSM bila dikoreksi tetapi suatu ketika menjadi mitra pemerintah utamanya dalam sosialisasi program terkadang pemerintah memohon kepada LSM untuk direkomendasikan program utamanya dana hibah seperti pelestarian budaya dan tempat-tempat yang dikeramatkan dengan ulah program wisata budaya leluhur.

Begitu pula masyarakat langganannya positif bila mendapat bantuan dari LSM tetapi akan berubah negatif bila tidak kebagian dana KUT dengan berbagai tuduhan juga tanggapan yang serupa antar LSM yang tidak memperoleh proyek dari pemerintah merasa dianaktirikan sehingga timbullah istilah LSM plat merah.

Tanggapan positif maupun negatif bagi LSM Syekh Yusuf adalah dinamika kehidupan dan itulah arti hidup yang sebenarnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. LSM atau Yayasan belum mempunyai Laporan Keuangan yang layak sebagaimana pada Badan Usaha yang berbadan hukum sehingga menyulitkan untuk perhitungan pajak yang dikenakan, padahal memiliki NPWP.
2. Laporan Pertanggungjawaban LSM bergantung pada keinginan pemberi kerja atau pemberi dana sehingga untuk mengaudit Laporan Keuangannya sulit sekalipun telah diadakan asistensi.
3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggapan positif dan negatif tentang keberadaan LSM di masyarakat.

5.2. Saran

Untuk pengembangan LSM dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang ada di masyarakat, kami sarankan :

1. Pemerintah sebagai mitra kerja LSM kiranya dapat membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan bagi LSM untuk memudahkan perhitungan pajak.
2. Pemeriksaan Laporan Keuangan LSM bukan hanya dari pemberi dana tetapi juga diharapkan dari pihak Akuntan Publik maupun pihak tenaga akademisi sebagai pihak yang mengetahui prosedur pencatatan akuntansi.
3. Dalam rangka Good Governance, maka LSM atau Yayasan diharapkan transparansi dalam menyajikan laporan keuangannya sebagai lembaga sosial yang selalu menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam pemerintahan yang baik, sebab LSM didirikan untuk memberdayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2001). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, Yogyakarta BPFE.
- Hadad, Ismid (1983). *Pengembangan Swadaya Masyarakat*, Prisma 4, April.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury (2000). *Public Sector Accounting*. Harlow, England : Prentice Hall.
- Lengowsky, Leslie (1996). *Philinthropy and Welfare State*. Dalam Peter L. Berger dan Richard John Nuehaus, to Empower People : From State to Civil Society. Second Edition, Washington, D.C : The AEI Press.
- Pijono (1995). *Peran Organisasi Nirlaba, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Pola Interaksi dengan Pemerintah*. Dalam Bantarto Bandooro, et.al, Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia, Jakarta : CSIS.
- Rosjidi (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah*, Surabaya : Aksara Satu.
- Siregar, Amir Effendi (1988). *Pertumbuhan dan Pola Komunikasi (LSM/LPSM)*, Prisma XVII No. 4.
- Sumodiningrat (1995). *Peran LPSM Dalam Memecahkan Kemiskinan*, Media Indonesia, 21 Juni.
- Uphoff, Norman (1995). *Why NGOs are not a Third Sector's Sectoral Analysis with Some Thoughts on Accountability, Subtainability and Evaluation*, Dalam Michael Edward 85 David Hulme (ed). Non Governmental Organizations Performance and Accountability. London : Earthscan Publications.

Tabel 1
Jenis Program, Jumlah Anggaran, Sumber Dana, Jenis Bantuan, Jenis Kegiatan dan Lokasi Kegiatan
LSM Syekh Yusuf Sul-Sel

No.	Tahun	Jenis Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1999	Pendampingan Perbaikan Lingkungan Kumuh	75.000.000	APBN melalui Pembagro Proyek DAM Bili-Bili Provinsi Sul-Sel	Hibah	Pendampingan	Desa Ianna, Desa Manuju (Kec. Parangloe)
2.	2000	Kredit Usaha Tani (KUT)	868.633.000	Bank Dunia melalui Departemen Koperasi RI (BKSLP5K)	Pinjaman lunak (Loan)	Bantuan bibit dan saprodi	Desa Garing, Malakaji Barukeke (Kec. Tompobulu)
3.	2001	Community Based Development (CBD) Tahap I	378.000.000	Bank Dunia, APBN dan APBD Provinsi Sul-Sel dan APBD Kab. Gowa.	Hibah	Tribina program	Kel. Pallantikang Kec. Somba Opu Kab. Gowa
4.	2002	Community Based Development (CBD) Tahap II	252.000.000	Bank Dunia, APBN dan APBD Provinsi Sul-Sel dan APBD Kab. Gowa.	Hibah	Tribina program	Kel. Bonto-Bontoa Batangkaluku, Katangka (Kec. Somba Opu)
5.	2003	Pelatihan / Pendampingan Pemasangan Pipa / Bank Penampungan Air Bersih	172.000.000	APBD Kab. Gowa melalui Kimpraswil.	Hibah	Bantuan material	Kel. Katangka, Tompobalang (Kec. Somba Opu)
Jumlah			1.746.283.000				

Sumber Data : LSM Syekh Yusuf Sul-Sel



Tabel 2
LAPORAN KEUANGAN BKM PALLANTIKANG

Nama BKM : Pallantikang
Kecamatan : Somba Opu

Kelurahan : Pallantikang
Kabupaten : G o w a

Alokasi Dana 60 % (Rp.)	Jumlah Penyerapan (Rp.)	Penggunaan			Keterangan
		Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
60.480.000	36.282.350	I. PELATIHAN			
		BINA MANUSIA	34.840.000		
		1. Pelatihan Pengelolaan Kredit Kecil	4.930.600	4.930.600	
		2. Pelatihan Disain Gerabah	6.335.500		
		3. Pelatihan Manajemen Keuangan	5.321.900		
		4. Disain Anyaman Tikar	5.768.000		
		5. Kader Kesehatan Masyarakat	4.982.000		
SALDO	14.930.400	6. Manajemen Organisasi	4.982.000		
		7. Adm. BKM	2.520.000	1.241.700	
		II. BINA EKONOMI	33.200.000		
		1. Penguliran Dana untuk 88 orang		19.600.000	
		III. FISIK LINGKUNGAN	32.760.000		
		1. Pemb. Mesjid Limbungan 1 Unit	10.252.000	5.126.000	
		2. Pemb. Posyandu 2 Unit	9.616.600	4.808.300	
		3. Rehab. Mushallah Nurul Iman	504.000	252.000	
		4. Rehab. Mesjid Sandi	1.839.000	919.500	
		5. Rehab. Mesjid Pasulileng 2	1.839.000	919.500	
		6. Jembatan Penyeberang 2 Unit	1.914.400	957.000	
		7. Pemb. Bak Air	6.795.000	6.795.000	
			100.800.000	45.549.600	

Menyetujui :
Ketua BKM Pallantikang

Pellantikang, Desember 2000
Disusun oleh :
Bendahara BKM Pallantikang

Mengetahui :
Faskel Pallantikang,

H. Ince Husaln Dg. Rani

H. Mallawangan Tawang

Syamsuddin



Topik: Akuntansi di Ragam Organisasi Non Profit

Tabel 7
DAFTAR PERKEMBANGAN PENYALURAN KUT MT. 2000
KUD / KOPERASI / LSM : SYEKH YUSUF
POSISI : TANGGAL 20 APRIL 2000

No.	NAMA KLP. TANI	Jumlah Anggota	Alamat		C O (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyaluran		Sisa yang belum tersalur			
			Desa	Kecamatan			Biaya Garap (Rp.)	Saprodi (Rp.)	KT (Rp.)	LSM (Rp.)	Bank (Rp.)	Lain (Rp.)
1.	Battu Rikatte	30	Pacclnongan	Somab Opu	32.405.000,-	32.405.000,-	-	25.270.100,-	-	-	7.134.900,-	-
2.	Watu-Watu	52	Julu Pa'mal	Pallangga	72.500.000,-	72.500.000,-	-	42.500.000,-	-	-	30.000.000,-	-
	Jumlah	82			104.905.000,-	104.905.000,-	-	67.770.100,-	-	-	37.134.900,-	-

PENGURUS KUD/KOPERASI/LSM SYEKH YUSUF

KETUA,

SEKRETARIS/BENDAHARA,

AMINULLAH

IRIANTO



Topik: Akuntansi di Ragam Organisasi Non Profit

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
YAYASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
- b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut;
- b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum; dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan

Publik.

- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.”

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.”

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

- (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.”

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 68

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.”

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
 tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

**STUDI TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
GEREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT SURABAYA**

Wulan Panca Sakti
UPNV Jatim

Abstrak

Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya adalah suatu gereja yang sangat berkembang, gereja ini telah berhasil mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk pelayanan, seperti mendirikan sekolah, membantu jemaat yang kurang mampu melalui pundi-pundi kasih, koperasi, pengobatan gratis dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan keuangan dalam gereja, meliputi pemasukan dan pengeluaran dalam gereja.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi yang digunakan dalam gereja.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan dalam gereja.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan alternative. Sedangkan variasi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara kepada gembala sidang / pemimpin gereja dan bendahara. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil wawancara kepada pengurus dan karyawan gereja. Jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik snow-ball, yaitu penggalan data melalui wawancara-mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas" lagi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduction, data display dan Conclusion Drawing.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa GKJW telah berhasil dalam mengelola manajemen keuangan dalam gereja. Mereka telah berhasil membuat suatu pelaporan keuangan yang sangat jelas dan transparan, sehingga laporan keuangan GKJW dapat menjadi ukuran atas keberhasilan setiap program yang telah mereka rencanakan dalam satu tahun. Selain itu dengan adanya pelaporan keuangan yang jelas dan transparan, maka pengurus gereja dapat dengan mudah membuat suatu pertanggungjawaban kepada jemaat gereja. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas maka kepercayaan jemaat kepada gereja semakin meningkat, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan sumbangan kepada gereja. Dengan adanya transparansi laporan keuangan maka kesalah pahaman atau kecurigan-kecurigaan dalam gereja dapat dihindari, dengan demikian perpecahan dalam gereja dapat dihindari, karena untuk selamanya gereja harus tetap berusaha menjaga keutuhan dalam gereja, dengan kata lain kesatuan tubuh Kristus harus dapat diwujudkan dalam gereja, Dengan adanya kesatuan tubuh kristus di dalam gereja maka gereja dapat terus meningkatkan pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penelitian ini akan membahas tentang organisasi non laba yang jarang sekali dibahas akuntabilitasnya, yaitu organisasi yang bertipe *charity*. Salah satu bentuk organisasi non laba dengan tipe *charity* ini adalah gereja. Menurut Mahsun (2006:224) gereja dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari gereja tersebut. Jika dilihat dari sudut badan hukumnya, gereja merupakan yayasan gerejawi karena didirikan berdasarkan Surat Pendirian Gereja.

Pemasukan dana terbesar dalam gereja adalah dari sumbangan donatur yaitu jemaat gereja. Sekitar tahun 1860-an, jumlah penganut Kristen Protestan di Indonesia adalah sekitar 100.000-120.000 orang (www.sejarahkitabindonesia.com). Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur jumlah penganut Kristen Protestan di Jawa Timur dan Surabaya setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2001 jumlah penganut Kristen Protestan di Jawa Timur 564.603 orang dan pada tahun 2003 mengalami pertambahan menjadi 575.182. Sedangkan jumlah penganut Kristen di Surabaya setiap tahunnya juga terus bertambah, pada tahun 2003 berjumlah 240.600 orang, tahun 2004 berjumlah 254.845, tahun 2005 berjumlah 272.500 (data Badan Pusat Statistik Jawa Timur). Data – data tersebut membuktikan meningkatnya jumlah donatur dalam gereja khususnya gereja-gereja di Jawa Timur dan Surabaya, dengan demikian diperlukan pertanggung jawaban yang baik atas laporan keuangan dalam gereja. Dengan laporan keuangan yang baik gereja dapat mempertanggungjawabkan atas setiap dana-dana yang diterima kepada donatur gereja yaitu jemaat gereja.

Dengan demikian, ketebukaan akan laporan keuangan gereja sangatlah penting, sehingga pertanggung jawaban atas keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan umat yang telah memberikan amalnya kepada gereja untuk mengelola dana tersebut.

Organisasi non laba terus didesak untuk senantiasa menyiapkan rencana-rencana serta program dan penganggarannya. Tuntutan akan *akuntabilitas* memadai, untuk organisasi non laba khususnya gereja bukanlah hal yang mudah, sering kali bendahara gereja adalah seseorang yang punya pengalaman dalam bidang akuntansi bisnis, tapi tidak memiliki pelatihan / ketrampilan khusus dalam akuntansi gereja. Pengurus gereja mengharapkan bendahara atau sekretaris keuangan gereja untuk

menagani keuangan secara layak, meskipun mereka mungkin memiliki sedikit pengetahuan dalam akuntansi ([www.accounting forchurches.com](http://www.accountingforchurches.com)). Dalam penelitian ini, peneliliti akan belajar banyak pada objek studi yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Surabaya. Dengan pendekan *interpretif* peneliti ingin mendapatkan suatu gambaran mengenai manajemen pengelolaan keuangan pada Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Surabaya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di dalam organisasi non profit yang telah diuraikan pada sub bab diatas, maka berikut ini dibuat suatu perumusan masalah yang dapat dituangkan dalam sebuah main research question, yaitu :

" Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan gereja "

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjawab beberapa pertanyaan mini research question berikut ;

1. Bagaimana manajemen keuangan gereja ?
2. Bagaimana sistem akuntansi dalam gereja ?
3. Bagaimana efektifitas pengelolaan keuangan dalam gereja ?
4. Bagaimana bentuk usulan / rekomendasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dalam gereja ?

Tujuan Penelitian

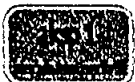
Setelah melakukan kajian masalah organisasi non profit, yang selanjutnya dilakukan rumusan atas permasalahan yang telah terjadi, berikut ini akan dibuat suatu tujuan dari penelitian berikut ini antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan keuangan dalam gereja, meliputi pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam gereja.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi yang digunakan dalam gereja.
3. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan dalam gereja.

Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, baik bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu :

1. Mengetahui secara pasti sumber pendanaan gereja dan bagaimana pengoperasian dana dalam gereja.



2. Mengetahui penerapan akuntansi dalam gereja.
3. Memberikan pertimbangan dan masukan bagi gereja tentang manajemen pengelolaan keuangan gereja.
4. Memberikan gambaran pada gereja tentang dampak yang mungkin terjadi jika terdapat kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan gereja.
5. Menunjukan kepada jemaat gereja bahwa terdapat manajemen pengelolaan keuangan gereja.
6. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada penulis tentang akuntansi dalam gereja.

Ruang Lingkup dan Pembahasan

Pembahasan akan dilakukan dengan menitikberatkan pada aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas gereja, yang merupakan aktifitas terbesar dan terpenting dalam organisasi non laba. Pembahasan tersebut berupa pemahaman mengenai sumber pendanaan dan pengoperasiannya, cara pencatatan akuntansi keuangan gereja dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam gereja.

II. TINJAUAN PUSAKA

2.1. Manajemen Keuangan

Menurut Yuwono, dkk (2005:2) definisi yang paling sederhana dari istilah manajemen adalah proses pengambilan keputusan. Stoner (2000) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Pengertian dan Proses Akuntansi

Badan Usaha dan Manajemen

Manajemen dalam melaksanakan tugasnya memerlukan informasi mengenai bisnis atau lembaga yang dipimpinnya. Informasi ini dimaksudkan untuk dua hal:

1. Untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan (*Decision Making*).
2. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan (*Accountability*).



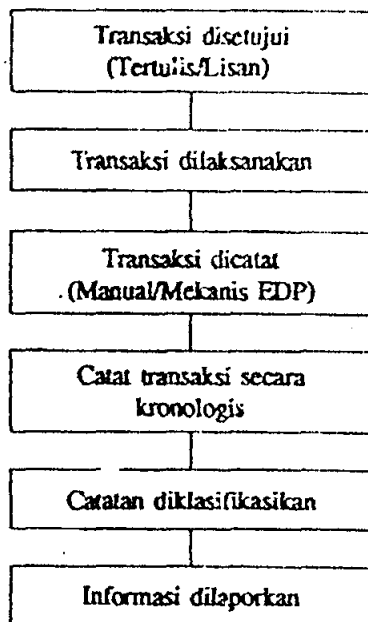
Untuk memenuhi tujuan inilah akuntansi berperan. Akuntansi memberikan informasi yang sangat dibutuhkan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pengarahan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Akuntansi sebagai bagian dari informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya. Di sini akuntansi merupakan alat pembantu untuk memperlancar tugas-tugas manajemen (*facilitating function*) tujuan utama dalam fungsi perencanaan dan pengawasan.

Sistem Akuntansi

Proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Stettler menggambarkan elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data seperti di bawah ini. Dikutip dari Harahap (2002:49) elemen yang umum dipakai dalam setiap pengolahan data:



Gambar 2.2. Elemen Pengolahan Data

Sumber: Harahap (2002:49)

Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

Menurut Hanafi, Halim (2003:33-35) Karakteristik kualitatif informasi akuntansi dikatakan kualitatif karena samapi saat ini tidak ada model matematis atau kualitatif yang bisa dipakai untuk membentuk informasi yang bermanfaat. Karakteristik-karakteristik tersebut akan membedakan informasi yang bermanfaat dengan informasi yang kurang bermanfaat. Supaya bermanfaat, informasi akuntansi setidaknya-tidaknya mempunyai karakteristik setidaknya-tidaknya pada tingkat minimum :

1. Bisa dipahami (understandability)
2. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan
3. Relevan
4. Nilai prediksi dan umpan balik
5. Tepat waktu

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Memilih metode yang tepat dalam penelitian, ditentukan oleh maksud dan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pada deskripsi yang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Penelitian ini lebih mempunyai *perspektif emik*. Menurut Hamidi (2004:70) *Perspektif emik* yaitu data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian. Sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam gereja. Deskripsi informasinya atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *alternative*. Menurut Efferin,dkk (2004:24-25) Pendekatan *alternative* menggunakan peneliti sendiri sebagai alat untuk mencapai suatu kesimpulan. Kekuatan pendekatan ini bukan pada "objektivitas" hasil studi yang diperoleh, namun lebih ke pengenalan



secara mendalam atas fenomena yang diteliti. Sedangkan variasi pendekatan *alternative* yang digunakan adalah *pendekatan Interpretif*.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam penelitian ini kita akan membuat studi kasus mengenai laporan keuangan keagamaan, khususnya laporan keuangan keagamaan gereja di Surabaya. Lokasi ini dipilih atas hasil pengamatan peneliti atas perkembangan gereja-gereja di Surabaya. Selama dua tahun terakhir ini di Surabaya terjadi peningkatan penganut umat kristen, dan juga terjadi peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah (gereja) di kota Surabaya, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur. Sebagai Objek yang dipilih adalah Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, gereja ini dipilih karena menurut hasil survey di lapangan, GKJW adalah suatu gereja yang sangat berkembang, gereja ini telah berhasil mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat dengan berbagai bentuk pelayanan, seperti mendirikan sekolah, membantu jemaat yang kurang mampu melalui pundi-pundi kasih, koperasi, pengobatan gratis dan lain sebagainya. Selain itu gereja ini telah berhasil membuat suatu laporan pertanggungjawaban yang sangat transparan kepada jemaat dan donatur.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data

Unit (satuan) analisis data penelitian ini pertama adalah individu sebagai pengurus gereja, dengan kriteria:

1. Menguasai keorganisasian gereja.
2. Mengetahui kondisi, serta visi-misi gereja.
3. Memahami manajemen keuangan dalam gereja.
4. Mengetahui dan memahami pencatatan akuntansi dalam membuat laporan keuangan sebagai akuntabilitas gereja pada stakeholder.

Kedua, unit analisis yang berupa situasi keagamaan jemaat (terutama untuk teknik observasi) yang meliputi: situasi para informan berkumpul di gereja sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dalam gereja (ibadah), waktu bekerja dalam kantor gereja, berbincang-bincang santai di rumah atau di kantor gereja pada waktu mereka secara kebetulan mempunyai waktu senggang.

Jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Menurut Hamidi (2004:75) *snow-ball* yaitu penggalian data melalui wawancara-mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas" lagi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pertama digunakan adalah wawancara mendalam terhadap para pelaku organisasi.

Teknik kedua digunakan adalah observasi terhadap tindakan dalam proses akuntansi gereja. Observasi tersebut dapat dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan juga pada saat mereka membuat keputusan investasi, keputusan pandanaan, keputusan manajemen aktiva hingga dalam pembuatan laporan keuangan gereja.

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Dikutip dari Sugiyono (2005:91-99), Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

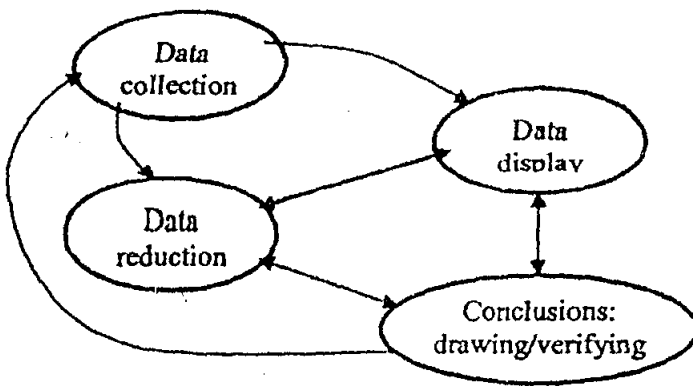
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini miles dan Humberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing / Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan Humberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.



Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Sumber: Sugiyono (2005:92)

3.6. Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atas kebenaran dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut dengan keabsahan data:

1. Derajat kepercayaan (*kredibility*)

Uji kredibility atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk repport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direka secara pasti dan sistematis. Dalam peningkatan

ketekunana peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

c. **Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

2. **Pengujian Transferability**

Seperti telah dikemukakan bahwa, *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. **Pengujian Depenability**

Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *depenability*nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliabel atau dependable.

4. **Pengujian Konfirmability**

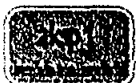
Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

IV. MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN SURABAYA

Visi dan Misi GKJW

Visi Gereja Jawi Wetan, antara lain

1. Penentuan dalam tumbuh kembangnya gereja adakah gerak dan peranan warga gereja. Oleh karena itu justru warga gereja ini harus selalu dibina dan dilengkapi sehingga mereka dapat melakukan panggilannya dalam mewujudkan persekutuan pelayanan cinta kasih dan kesaksian.
2. Warga gereja diseluruh GKJW itu tidak bergerak sendiri-sendiri dan terpisah-pisah satu sama lain, melainkan meyakini sebagai suatu kesatuan organisasi hidup yang



merupakan suatu patunggilan kang nyawiji. Sehingga keseluruhan tubuh secara teratur, seimbang dan berbuah banyak.

3. GKJW menyadari bahwa sebagai gereja mandiri, adanya GKJW di dunia ini adalah bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan untuk dunia melalui melakukan kasih, kebenaran, keadilan dan mewujudkan damai sejahtera.

Bertitik tolak sejarahnya, teologinya dan struktur gerejanya sebagai patunggilan kang nyawiji itu selanjutnya GKJW juga ingin mewujudkannya dalam pengaturan dan sharing sumber daya manusianya dan sumber dananya. Bahwa pendeta adalah bukan hanya pendeta jemaat setempat, melainkan pendeta GKJW secara keseluruhan. Harta milik dan sumber dana yang ada bukanlah milik jemaat setempat, melainkan milik dan untuk digunakan bagi pertumbuhan GKJW secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dana yang terkumpul haruslah dikelola oleh gereja sedemikian rupa untuk dapat mencapai semua visi misi Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka dari itulah sangat diperlukan pengelolaan keuangan dalam gereja, supaya akuntabilitas gereja terus berlangsung, dan jemaat semakin percaya pada gereja untuk menyerahkan persembahan / dana itu untuk dikelola oleh gereja demi pelebaran kerajaan Allah di dunia. Sebab ada tertulis dalam alkitab salah satu perintah Tuhan yang utama adalah " Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:19-20).

Struktur Organisasi Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya

Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya mempunyai susunan pengus gereja atau yang sering disebut dengan Susunan Personalia Majelis Jemaat Gereja Jawi Wetan Surabaya, sebagai berikut:

1. Pelayan Harian Majelis Jemaat

Terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, Bendahara III, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III, Ketua Bidang IV, Ketua Bidang I, Pembantu Umum. Pembantu Umum ini terdiri atas Ketua Blok-blok penginjilan. Dimana blok-blok penginjilan dalam GKJW Surabaya terbagi atas 5 blok, yaitu Blok III, Blok V, Blok VI, Blok VIII, Blok



XI. Masing-masing blok mempunyai ketua blok yang tergabung dalam susunan Personalia Majelis Jemaat.

2. Badan – badan Pembantu

Terdiri dari: Bidang Teologi, Bidang Persekutuan, Bidang Kesaksian, Bidang Pelayanan Cinta Kasih, Bidang Penatalayanan, Lintas Bidang. Setiap Bidang mempunyai komisi-komisi, yaitu seperti komisi Pembinaan Teologi, komisi Pembinaan Anak dan Remaja, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, Komisi Hubungan Masyarakat, Lembaga Setya Mitra, Komisi Pengawasan Perbendaharaan dan masih banyak komisi-komisi lainnya dalam gereja.

3. Pembantu Umum

Terdiri dari para pengurus setiap blok-blok dalam Pembantu umum. Setiap blok mempunyai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, pengurus seksi-seksi.

Selain Susunan Personalia Majelis Jemaat juga terdapat karyawan gereja yang setiap harinya mengurus semua pelayanan di dalam gereja. Karyawan gereja tersebut terdiri dari: sekretariat, urusan umum, keamanan dan logistik, urusan UPL dan perkawinan jemaat, urusan keuangan jemaat. Setiap karyawan gereja ini masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri dalam kesehariannya.

Program Kegiatan Tahunan

Keberhasilan suatu lembaga untuk dapat tetap bertahan ditengah-tengah tantangan dan persaingan yang sangat kompetitif dapat diukur melalui berbagai upaya lembaga tersebut dalam mempertahankan keberadaannya sesuai jati dirinya masing-masing. Adapun kelangsungan hidup suatu lembaga sangat ditentukan oleh kemandirian, kedewasaan dan komitmen lembaga tersebut dalam mengemban misi dan visinya, agar tidak di tinggalkan oleh komunitasnya.

Dengan demikian setiap setahun sekali GKJW mengadakan rapat kerja tahunan, salah satu yang mereka bahas di dalam rapat tersebut adalah membicarakan tentang apa saja yang akan mereka lakukan dalam satu tahun kedepan.

Setelah itu mereka membuat rancangan anggaran pemasukan dan pengeluaran gereja selama satu tahun kedepan. GKJW sebagai patunggilan kang nyajiwi, senantiasa merencanakan program-programnya, baik jangka pendek, menengah dan panjang sebagaimana yang terkandung dalam pokok-pokok Rencana Kegiatan Tahunan (PKT).



Manajemen Keuangan Dalam Gereja

Manajemen keuangan dalam Gereja Kristen Jawi Wetan pada dasarnya berdasarkan *cash basic*. Dikatakan *cash basic* karena sebagian besar transaksi dalam gereja merupakan keluar masuk kas, dan pencatatan yang dilakukan berdasarkan waktu kas masuk dan waktu kas keluar.

Sumber dana terbesar Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Surabaya adalah dari persembahn jemaat GKJW setiap minggunya. Pemasukan GKJW dapat Surabaya dibedakan menjadi persembahan rutin, Persembahan musiman, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan lain-lain.

Pengelolaan keuangan GKJW Jemaat Surabaya, dibedakan berdasarkan pemanfaatannya, yaitu:

1. Kas Jemaat

Mencatat / mengadministrasikan semua keuangannterkait dengan kegiatan / program kegiatan thunan (PKT), yang terdiri dari:

- Pengeluaran Rutin
- Biaya kerja Rutin
- Pengeluaran Pembangunan
- Dana Persekutuan
- Lain-lain.

Sedangkan saldo sehari-hari sebagian disimpan dalam bentuk tabungan, kas kecil/uang tunai dan UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan).

Kas Kecil / Uang Tunai yaitu uang yang disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan gereja sehari-hari, yang dikelola oleh bagian Administrasi Keuangan Harian Jemaat.

UUDP adalah sejumlah uang yang dikelola oleh komisi/ badan pembantu / bidang untuk membiayai kegiatan / program yang sedang dilaksanakan. Dan uang tersebut harus dipertanggungjawabkan segera, maksimal selama 2 minggu sejak uang diterima oleh yang bersangkutan dari Bagian Administrasi Keuangan Harian Jemaat.

Sumber keuangan dari kas jemaat adalah dari persembahan warga jemaat. Dan setiap akhir periode tahun anggaran, saldo dipindahkan ke Simpanan Dana Cadangan.

2. Simpanan Hari Tua Karyawan

Simpanan ini dalam bentuk tabungn dan deposito, yang pemanfaatannya untuk memberikan dana cadangan kasih kepada karyawan yang pensiun / mengundurkan diri.

Sumber dana dari bunga tabungan deposito, serta simpanan rutin setiap bulan dari kas jemaat, sesuai anggran dalam PKT. Keputusan pengeluaran uang atas persetujuan PHMJ (Pengurus Harian Majelis Jemaat) sidang Majelis Jemaat. Perlu diketahui setiap minggu sekali diadakan rapat PHMJ untuk membahas apa saja kegiatan yang sudah terealisasi selama 1 minggu. Dan setiap 3 bulan sekali diadakan rapat majleis jemaat, untuk membahas kegiatan apa saja yang telah berlangsung selama 3 bulan. Semua ini dilakukan sebagai fellowship atas program kerja yang talah direncanakan dalam 1 tahun, sehigga pemasukan dan pengeluaran dalam gereja dapat sedemikian rupa terkontrol sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

3. Simpanan Dana Mandiri

Simpanan dana mandiri dalam bentuk deposito, yang pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan LSM (Lembaga Setia Mitra). LSM adalah salah satu bentuk pelayanan kasih GKJW kepada para jemaatnya untuk membantu setiap anggota jemaatnya yang tidak kurang mampu. Sebagai contoh LSM memberikan beasiswa, Bantuan modal usaha untuk jemaatnya, pinjaman uang untuk jemaat yang kekurangan diama pinjaman ini tidak dibatasi pengembaliaannya dan juga tanpa dipungut bunga pinjaman sama sekali. Karena pada dasarnya LSM ingin membagi kasihm, sebagai kepedulian kepada sesama umat yang membutuhkan pertolongan.

Yang secara nil, yaitu setiap bulan bunga dari simpanan Deposito ditransfer secara "auto" ke rekening LSM. Perlu diketahui simpanan dana cadangan ini juga dapat disebut sebagai simpanan dana abadi, sehingga simpanan ini tidak bisa diambil dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itulah hanya bunga dari simpanan inilah yang dapat dipergunakan gereja sebagai dana tambahan untuk pelayanan dalam gereja

Simpanan dana mandiri jumlahnya relatif tetap, secra historis sumber dana berasal dari hibah / penyerahan waris dari warga jemaat.



4. Simpanan Dana Cadangan

Simpanan dalam bentuk Tabungan dan Deposito yang menampung pemindahan saldo setiap akhir periode tahun anggaran dari kas jemaat (point 1) dan hasil jasa pengelolaan BP (balai pelayanan) dan Pondok Kasih. BP merupakan penyewaan tempat pertemuan gereja semisal untuk perkawinan, ulang tahun, acara keluarga dan lainnya. Sedangkan Pondok kasih adalah penyewaan tempat untuk kos-kosan. Sedangkan pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran program / kegiatan yang relatif memerlukan biaya besar atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak terprogram dalam PKT. Misalnya renovasi pastori (rumah tinggal pendeta), renovasi gedung gereja atau pembelian sarana transportasi gereja (mobil), pengurusan sertifikat tanah gereja. Pengeluaran uang atas persetujuan PHMJ (Pelayan Harian Majelis Jemaat) dan atau Sidang Majelis Jemaat.

Sistem Akuntansi Dalam Gereja Jawi Wetan Surabaya

Seperti yang telah dibahas sebelumnya GKJW setiap tahunnya selalu mengadakan PKT (Program Kerja Tahunan), didalam PKT tersebut tidak hanya anggaran penerimaan saja, tetapi juga anggaran pengeluaran GKJW selama satu tahun.

Pengeluaran GKJW selama satu tahun dapat dibagi menjadi:

1. Pengeluaran Rutin
2. Biaya Kerja Rutin
3. Pengeluaran Pembangunan
4. Dana persekutuan ke MD (Majelis Daerah)
5. Dana persekutuan ke MA (Majelis Agung)
6. Premi dan Pensiun.
7. Lain-lain.

4.5.1. Pencatatan akuntansi dalam gereja

Pengeluaran rutin dalam gereja terbagi atas, jaminan tenaga kerja, pengobatan, rapat-rapat, ongkos jalan, dan lain-lain. Biaya kerja rutin antara lain keperluan katekisasi, keperluan teologi, keperluan musik gereja dan keperluan pelayanan lainnya yang telah masuk dalam program PKT. Pengeluaran Pembangunan antara lain untuk keperluan kesaksian, keperluan pemuda dan remaja, keperluan peranan wanita, dan

lain sebagainya. Dana persekutuan ke MD (Majelis Daerah) dan Dana Persekutuan ke Majelis Agung adalah persembahan dari jemaat untuk mendukung kegiatan pelayanan di Majelis Daerah dan di Majelis Agung. Semua transaksi-transaksi di atas diambilkan dana dari kas jemaat. Kas jemaat tersebut dipegang oleh karyawan gereja bidang urusan keuangan jemaat. Jadi yang bertugas memperhatikan semua pengeluaran diatas adalah Bapak Sridadi sebagai bagian urusan keuangan jemaat. Dalam kesehariannya beliau selalu berada di kantor gereja untuk mengurus keuangan gereja setiap harinya. Apabila ada pemasukan dan pengeluaran beliau yang bertugas mencatat semua transaksi dalam gereja dalam sehari-harinya. Beliaulah yang menerima semua bukti-bukti transaksi baik kas masuk maupun kas keluar. Tidak jarang juga beliau mengeluarkan cash bon dimana cash bon tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus gereja / komisi maksimal 2 minggu setelah acara berlangsung. Beliau selalu membuat laporan keuangan per mingguan. Dimana laporan keuangan mingguan itu ditujukan untuk evaluasi di rapat Pelayan Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Dari laporan mingguan tersebut dapat diketahui berapa jumlah uang yang masuk dalam satu minggu dan berapa jumlah uang yang keluar dalam satu minggu. Dengan laporan ini PHMJ dapat mengetahui berapa persen program yang sudah terlaksanakan dan berapa persen program yang belum terlaksana. Dari sinilah PHMJ dapat mengontrol keuangan dalam gereja, bagian mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan bagian yang mana yang dapat dikurangi untuk membantu bagian yang kekurangan dana. Sehingga sistem balance budget dapat terus terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam gereja. Hasil akhir dari laporan mingguan ini adalah Rekapitulasi keuangan GKJW Jemaat Surabaya. Dari rekapitulasi ini kita dapat mengetahui posisi keuangan gereja baik secara tunai maupun uang yang ada di bank.

Berikut ini contoh dari Laporan keuangan mingguan Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya:



- Pasal 600 untuk penggolongan transaksi *premi dan pensiun*.
- Pasal 700 untuk penggolongan transaksi *lain-lain*.

Sedangkan Mata Anggaran merupakan *program kerja setiap bagian pelayanan* yang telah disetujui dalam PKT (Program Kerja Tahunan). Sebagai contoh: GKJW mempunyai program kerja selama satu tahun untuk mengadakan pelayanan pengobatan seminggu sekali. Maka kegiatan tersebut merupakan pengeluaran rutin setiap minggu, dan program kerja dalam mata anggarannya adalah *pengobatan*. Contoh lain, program kerja untuk konsumsi rapat PHMJ seminggu sekali, maka mata anggarannya digolongkan sebagai pengeluaran rutin *rapat – rapat*.

Kolom menurut anggaran adalah *dana yang telah disepakati sebagai anggaran program kerja selama 1 tahun*. Kolom realisasi adalah *uang yang keluar atau masuk dalam minggu ini*. Sedangkan kolom Realisasi s/d adalah kolom yang berisi *akumulasi dana yang telah masuk atau terpakai sampai dengan tanggal dibuatnya laporan ini*.

Sehingga dari laporan ini kita dapat dengan jelas mengetahui sejauh mana program-program gereja yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana, selain itu setiap saat kita bisa mengetahui keuangan gereja secara sepenuhnya. Sehingga apabila terjadi kejadian di luar dugaan PHMJ atau majelis jemaat dapat dengan cepat mengambil keputusan.

Disini tugas bendahara adalah menindak lanjuti setiap laporan yang telah dibuat oleh bapak sridadi. Bendahara bertugas menyampaikan atau meinformasikan laporan keuangan ini kepada jemaat gereja. selain itu tugas bendahara juga mengelola keuangan ini sedemikian rupa untuk kemajuan gereja. bendahara membuat analisis perbandingan anggaran setiap tahunnya. Sehingga dalam tahun yang akan datang kita dapat mengevaluasi bagian-bagian mana saja yang tidak berjalan sesuai rencana dan apa yang menjadi kendalanya. Bendahara bertugas membuat laporan keuangan secara umum yaitu laporan keuangan tahunan. Demikian ini contoh dari laporan tahunan yang di buat oleh bendahara.

V. KESIMPULAN**5.1. Efektifitas Pengelolaan Keuangan dalam Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya**

Dengan adanya pengelolaan keuangan yang sangat baik dan transparan pada GKJW maka setiap program-program yang telah direncanakan kurang lebih 90 % setiap tahunnya dapat terealisasi dengan baik.

Selain itu Dengan laporan keuangan ini maka gereja telah berhasil menekan biaya-biaya mana yang dapat dikurangi untuk membantu komesi lain yang lebih membutuhkan. Sehingga dengan sistem demikian setiap komisi pelayanan bahu membahu saling membantu yang kuat membantu yang kuat, walaupun pelayanan mereka berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu seperti tubuh Kristus yang saling melengkapi satu sama lainnya.

Transparansi keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan yang sangat bagus ini, dapat meningkatkan kepercayaan jemaat untuk menyumbang dengan suka rela kepada gereja. hal ini terbukti dari persembahan pembangunan gereja, persembahan korban bencana, persembahan syukur dan lain sebagainya. Pada saat gereja membutuhkan dana untuk tambahan pembangunan gereja maka jemaat dengan suka rela memberikan sumbangannya untuk gereja, pada saat gereja mengalang dana untuk korban bencana, jemaat gereja dengan sukarela memberikan bantuan untuk korban bencana melalui gereja yang pastinya disalurkan oleh gereja untuk korban bencana tersebut. Selain itu jemaat juga selalu memberikan persembahan syukur dan persembahan perpuluhan pada gereja karena mereka mempunyai keyakinan apabila mereka memberikan persembahan dengan sukur dan tulus maka Bapa di Suraga pasti membalasnya, " Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu." (Matius 5:3-4).

Dengan laporan keuangan ini dapat membantu gereja untuk terus berkreatifitas demi mempelebar kerajaan Allah di dunia ini. Sebagai bukti gereja dapat terus mengembangkan pelayanannya, dan mulai mempelebar sayapnya. Sebagai contoh, jemaat mulyosari yang dulunya hanyalah pos penginjilan (salah satu blok GKJW Surabaya) tetapi sekarang, sudah dapat mandiri sendiri dan menjadi suatu gereja yang disebut dengan Jemaat Mulyosari, tentu saja dengan berdirinya mulyosari maka Jemaat Mulyosari mempunyai kepengurusan sendiri dan tidak lagi bergantung pada GKJW Surabaya lagi. Selain itu gereja juga dapat membuka suatu bentuk pelayanan

baru untuk para jemaatnya. Seperti pelayanan kesehatan yang diadakan gereja setiap minggunya untuk para jemaatnya, dipelayanan kesehatan ini gereja memberikan pengobatan gratis pada setiap jemaatnya, termasuk pemberian obat gratis pada setiap jemaat yang kurang mampu. Dan masih banyak bentuk pelayanan lainnya yang dilakukan gereja untuk meningkatkan kesejahteraan setiap jemaatnya.

Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik di dalam gereja maka, kepercayaan masyarakat kepada gereja semakin besar. Usaha gereja melakukan Transparansi keuangan dengan cara setiap minggunya gereja selalu memuat laporan keuangan dalam warta gereja, sehingga siapa pun dapat melihat kondisi keuangan gereja tanpa harus ada yang ditutupi. Hal ini membuat kepercayaan jemaat semakin besar pada gereja. dengan adanya pelolaan yang sedemikian bagus maka dapat mengurangi konflik dalam gereja, karena dengan adanya tranparasi ini juga dapat mengurangi timbulnya kecurigaan-kecurigaan di dalam masyarakat gereja tersebut. Apabila kecurigaan itu muncul di dalam masyarakat gereja maka para pengurus dapat dengan mudahnya memberikan semua penjelasan se jelas mungkin, karena memang selama ini gereja selalu berusaha untuk mengelola keuangan dengan lebih baik lagi supaya konflik-konflik itu dapat dihindari konflik dalam gereja baik sekarang maupun masa depan bahkan selama-lamanya.

Dengan pengelolaan yang sangat baik ini membuat gereja lebih muda dalam menyusun rencana-rencana pelayanan di masa mendatang. Hal ini dikarenakan gereja dapat dengan pasti melihat kondisi gereja saat ini, karena dengan pelaporan keuangan yang baik maka dapat memberikan gambaran suatu kondisi dalam gereja tersebut. Selain itu sebelum gereja membuat rencana-rencana yang baru, gereja juga dapat mengukur kemampuan gereja itu sendiri khususnya dalam bidang financial gereja. sehingga dengan demikian sangat membantu gereja untuk terus maju mencapai tujuan gereja atau gereja dapat dengan mudah mencapai visi misi yang telah mereka tetapkan. Hal ini dibuktikan GKJW pada saat mereka melakukan evaluasi tahunan, setiap rencana yang mereka rencanakan 90% dapat tercapai semua dengan sukses. Dengan kejadian ini maka membuat pengurus gereja untuk lebih semangat dalam memberikan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya.

5.2. Kesimpulan

Dengan berakhimya penelitian ini maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan dan suatu gambaran yang sangat jelas sekali engenai akuntansi dalam

gereja, khususnya peneliti dapat mendapatkan suatu gambaran tentang manajemen pengelolaan dalam gereja. karena menurut survei sebelum penelitian ini berlangsung, peneliti menemukan banyak sekali kurangnya transparansi keuangan dalam beberapa gereja di Surabaya. Bahkan ada juga suatu gereja yang kurang memperhatikan tentang manajemen keuangan dalam gereja, dalam survei peneliti juga menemukan keuangan gereja itu dipegang oleh satu orang saja sekaligus dia pemimpin gereja. Maka dengan kondisi seperti ini jemaat sama sekali tidak mengetahui manajemen keuangan dalam gerejanya tersebut.

Menurut peneliti sangat jarang sekali gereja di Surabaya ini yang mempunyai transparansi keuangan seperti yang terjadi di GKJW ini. Hal ini kemungkinan gereja tersebut tidak mempunyai gambaran tentang manajemen keuangan dalam gereja. Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan, dapat memberikan suatu gambaran tentang manajemen keuangan pada gereja lain.

Karena dalam penelitian ini sangat jelas sekali bagaimana pengaturan kas masuk dan kas keluar. Bagaimana membuat kontrol untuk setiap program yang telah dibuat, supaya pada akhirnya program itu dapat terlaksana dengan baik dan anggaran yang telah dilaksanakan dapat terpenuhi dengan baik.

Peneliti sangat berharap penelitian tentang akuntansi dalam gereja ini dapat terus dikembangkan. Sehingga masyarakat dapat mempunyai gambaran tentang akuntansi gereja semakin jelas.

5.3. Saran

Untuk meningkatkan profesionalisme dalam manajemen pengelolaan keuangan dalam gereja, maka akan lebih baik apabila gereja mencoba melakukan pencatatan dengan metode *accrual basis*. Metode *accrual basis* adalah Suatu metode akuntansi dimana penerimaan yang dihasilkan baru diakui atau dicatat apabila proses yang menghasilkan lengkap dan apabila transaksi pertukaran terjadi, sementara pengeluaran baru diakui atau dicatat apabila jumlah uang benar-benar dibayarkan. Artinya, dalam metode ini penerimaan dan pengeluaran baru diakui atau dicatat ketika terjadi, bukan ketika diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.

Selama ini gereja hanya membuat laporan keuangan yang berdasarkan pada cash basis, dalam pelaporan cash basis pencatatan hanya dilakukan pada saat kas masuk dan kas keluar. Sedangkan untuk segala transaksi yang tidak berhubungan dengan kas tidak dapat tercatat atau tidak dapat terlihat dalam laporan keuangannya. Padahal dalam kenyataannya terdapat transaksi yang tidak selalu bersamaan dengan kapan kas masuk dan kapan kas keluar, tetapi itu mempunyai suatu nilai, yang dapat menambah aset gereja.

Sebagai contoh, apabila pengurus gereja ingin merenovasi gedung gereja. maka diperlukan seorang arsitek dan beberapa bahan bangunan untuk melakukan renovasi itu. Ternyata ada seorang arsitek yang mau dengan suka rela membantu membuatkan desainnya (jasa arsitek), dan sekaligus memberikan sumbangan dengan cuma-cuma berupa bahan bangunan. Dari peristiwa ini gereja tidak mengeluarkan uang sama sekali, tetapi dari segi akuntansinya aset gereja mengalami kenaikan yang berupa sebuah bangunan yang memiliki nilai arsitektur baru, hal ini pasti akan menaikkan nilai dari bangunan gereja itu. Secara tidak langsung aset gereja bertambah, karena nilai dari bangunan gereja itu bertambah. Dari contoh peristiwa ini, apabila pencatatan dengan cash basis maka kita tidak tahu berapa penambahan aset dalam gereja itu, tetapi apabila kita menggunakan accrual basis maka dapat dengan mudah kita mengetahui penambahan aset gereja itu.

Selain itu dengan adanya neraca maka gereja dapat setiap saat mengetahui jumlah aset yang dimiliki gereja secara keseluruhan. Dengan adanya suatu peningkatan manajemen pengelolaan keuangan pada gereja Kristen Jawi Werten Jemaat Surabaya, maka jemaat akan lebih percaya untuk memberikan sumbangannya kepada gereja. Dan pada akhirnya nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Demikian penelitian ini saya sampaikan, besar harapan saya penelitian ini sangat berguna sebagai studi untuk siapapun yang membacanya. Terima kasih, Tuhan Berkati.



Selamat Datang di Gloria Cyber Ministries -- Connecting Believers -- Updated Harian

Halaman Utama | Dunia Kerja | Maunya Anak Muda | Taman Bacaan | Sosok | Wawancara
 Lintas Berita | Perilaku | Internet | Seputar Natal | Seputar Paskah | e-Mail Gratis
 Renungan Harian | Kesaksian | Opini Canda | Pokok Doa | Buku Tamu | Direktori



Lintas Berita: Yayasan Gereja Diminta Sesuaikan dengan UU No 28/2004

Yayasan Gereja Diminta
 Sesuaikan dengan UU No
 28/2004

Hasyim: Tidak Semua
 Konflik Umat Beragama
 Bersumber dari Agama

Rencana Kriminalisasi
 Pembinaan Anak-Anak
 Merokok

Gugurkan Kandungan
 Sendirian dan Dilempari
 Batu

Pemeluk Kristen Ortodoks
 Rusia Protes Konser
 Madonna

Glorianet - Yayasan atau lembaga sosial yang berada di bawah organisasi gerejawi diminta untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang Undang No 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan. Dengan mengacu pada Pasal 71 UU No 28 tahun 2004, maka jelaslah bahwa bagi yayasan yang belum memiliki kriteria sebagai badan hukum dapat memperoleh status hukum dengan menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan mengajukan permohonan ke Departemen Hukum dan HAM.

"Saya sangat berharap bagi yayasan dan lembaga sosial di bawah gereja dapat segera menyesuaikan anggaran dasarnya dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat tanggal 6 Oktober 2006 ini," ujar Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Weinata Sairin kepada *Pembaruan* di Jakarta, Rabu (6/9).

Dikatakan, bagi yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan mendapat izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat tanggal 6 Oktober mendatang.

Menurut dia, agar visi dan misi lembaga gerejawi tetap dapat terwujud dalam pelayanan yayasan dan relasi lembaga memiliki ikatan hukum dengan yayasan, maka perlu dilakukan langkah dan upaya hukum yang cepat dan tepat sehingga yayasan dapat mewujudkan pelayanan sosial dengan baik di tengah masyarakat. Dan Majelis Pekerja Harian PGI akan melakukan upaya terbaik agar yayasan-yayasan milik gereja dapat terus berkarya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Binsar Harahap menjelaskan bahwa lahirnya UU Yayasan didasari oleh kenyataan bahwa pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

"Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas," ujarnya.

Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Masalah tersebut, lanjutnya belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. (GCM/SP.com-E-5)

Dikembangkan Oleh Gloria Cyber Ministries
 © Copyright 2000-2008.
 All rights reserved.

Komang Adi Setiawan

- [Home](#)
 - [Inspiring Quote](#)
 - [About](#)
-

Mengelola Organisasi Nonprofit

November 22, 2007

Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nonprofit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia.

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari organisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi terhadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba.

Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profit yang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas dari gerak roda organisasi.

Seharusnya organisasi non profit tidak jauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission statement yang jelas, fokus dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata yang mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil,

merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin meluas dan tidak fokus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Indonesia. Struktur organisasinya memasukkan semua bidang, rata-rata memiliki lebih dari 20 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik karena dijamin orde baru hampir semua organisasi nonprofit yang berdiri menjadi underbow partai Golkar.

Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, mereka juga dengan mudah menjalin komunikasi serta menjadi anggota organisasi nirlaba asing. Disamping itu, komunitas yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri, telah menarik populasi yang sangat besar. Makin hari, organisasi konvensional makin ditinggalkan, yang dapat berkompetisi kedepan hanyalah organisasi yang mampu mengkombinasikan aktivitasnya dengan teknologi informasi.

Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang vital, demikian pula dalam organisasi nirlaba. Kriteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan dikemudian hari, serta mengetahui konsekuensi atas pengorbanan yang harus dijalani sebagai pemimpin organisasi nirlaba. Kriteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. Mendengar merupakan kriteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba karena pemimpin akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari para relawan sampai dengan orang-orang yang menjadi objek dari organisasi. Kriteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru memberi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak langsung. Kriteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal pengumpulan dana. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antara donatur, volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan kriteria-kriteria tersebut untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belum memiliki manajemen pengumpulan dana yang baik, kriteria kemampuan finansial dari calon pemimpin sering dikedepankan.

Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perang adalah uang, yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi non profit, tapi mengelola organisasi non profit tentunya berbeda dengan mengelola armada perang. Dalam organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana yang bersifat jangka panjang. Istilah fund rising di organisasi nirlaba sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat sebagai donatur dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang bersifat jangka panjang.

Possibly related posts: (automatically generated)

- [Konsistensi dalam Mengelola Organisasi Non Profit](#)

Entry Filed under: [non profit](#). .

2 Comments [Add your own](#)

- 1.  [emil](#) | May 14, 2008 at 2:35 am

saya adalahn anggota salah satu organisasi non profit, ada saran ngga mas bgmn buat cari

dananya?

- 2.  Komang Adi | May 14, 2008 at 4:56 am

Untuk organisasi Non Profit, dana memang paling sering menjadi kendala. Khususnya organisasi nonprofit/nirlaba lokal. Sumber dana yang bisa dimobilisasi ada 3 kelompok:

1. Iuran anggota
2. Donasi
3. CSR (Corporate Social Responsibility)

Iuran anggota merupakan sumber dana yang sustain dan harus digalang oleh organisasi nonprofit dengan anggota sebagai potensi utama.

Dana dari Donasi dan CSR sangat bergantung dari program-program yang diluncurkan. Program yang menarik dengan management pengelolaan yang baik dijamin akan menjadi target para donatur dan corporate untuk CSR nya.

Sukses dan maju terus.

Leave a Comment

Name *Required*
Email *Required, hidden*
Url

Comment

☐ Notify me of follow-up comments via email.

Some HTML allowed:

` <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <cite> <code>
<del datetime=""> <i> <q cite=""> <strike> `

[Trackback this post](#) | [Subscribe to the comments via RSS Feed](#)

Categories

- [Management](#)
- [non profit](#)
- [Politik](#)
- [Uncategorized](#)

Calendar

November 2007

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	<u>21</u>	<u>22</u>	23	24	25
26	27	28	29	30		
Dec »						

Top Posts

- [Mengelola Organisasi Nonprofit](#)
- [About](#)
- [TRANSFORMASI PERADAH](#)
- [Inspiring Quote](#)
- [Konsistensi dalam Mengelola Organisasi Non Profit](#)
- [Politik Pura-Pura](#)

Links

- [Dharma Dana](#)
- [Ikastara](#)
- [Nusatel](#)
- [Peradah](#)

Spam Blocked

30 spam comments
blocked by
Akismet

Blog Stats

- 4,237 hits

BAB IX

PERBENDAHARAAN

Pasal 12

1. Persembahan Mingguan, Persembahan Perpuluhan, Persembahan Khusus, persembahan lain-lain yang tidak mengikat.
2. Penerimaan hibah.
3. Penerimaan bantuan dari dalam dan luar negeri, serta pemerintah.
4. Kekayaan Jemaat yang berupa kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 13

PENGELOLAAN

1. Pengelolaan kekayaan Gereja dipegang di bawah Gereja yang ditetapkan dan dikur berdasarkan Keputusan Majelis Jemaat dan Majelis Sinode.
2. Pertanggungjawaban mengenai kekayaan Gereja secara berkala dilaporkan dan diserahkan kepada Sinode kepada Majelis Jemaat dan Sinode setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 14

YAYASAN

Untuk mendukung kegiatan pelayanan Sinode, maka dibentuklah Yayasan-yayasan di bawah pengawasan dan pengawasan Sinode, serta member-tanggungjawabkan secara teratur dan teraturannya kepada Sinode.

Pasal 15

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan baik ditingkat Jemaat, maupun tingkat Sinode GERTISA dilakukan secara berkala oleh suatu Badan Badan tetap yang terdiri dari satu Ketua dan dua anggota disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

